



**KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

**SELASA, 10 MARET 2020**

**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
|   | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
| X | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**Tunggakan Pajak Kernas Segera Dibayar**

**ARGA MAKMUR, BE** - Terkait dengan adanya tunggakan pajak kendaraan dinas (kernas) di Pemkab BU sejak 2013 hingga 2019, akan dibayarkan dalam waktu dekat. Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Pemkab BU) memiliki tunggakan pajak kernas ini mencapai Rp 728 juta.

Hal itu terjadi lantaran banyaknya dokumen kendaraan yang hilang serta anggaran yang tersedia tidak mencukupi. Namun Pemkab BU berkomitmen akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut. Hal ini pun disampaikan Asisiten III Setkab BU Ramadanus.

"Ya, terkait tunggakan ini kita sudah melakukan rapat, dan kita akan berkomitmen untuk melakukan pembayaran," kata Ramadanus.

Ia menjelaskan tunggakan pajak kernas merupakan masalah lama yang hingga saat ini masih dalam pembahasan pihaknya selama ini. Dimana yang menjadi penyebab tertunggaknya pajak kernas ini selain anggaran yang tidak mencukupi, dokumen kendaraan yang tidak tahu keberadaannya.

"Ini sebenarnya memang sudah lama kami bahas, lantaran dokumen kendaraan yang tidak tahu keberadaannya juga

menjadi penyebab utamanya," ujarnya.

Lenih lanjut, Ramadanus menuturkan, terkait komitmen ini pihaknya telah menyurati seluruh OPD untuk menginventarisasi kendaraan dinas, baik roda dua maupun roda empat guna mengetahui seberapa banyak pajak kendaraan yang belum dibayar dan untuk segera dibayarkan meskipun dengan cara bertahap. Sehingga permasalahan pajak kernas di Kabupaten BU secepatnya bisa terselesaikan meskipun hal tersebut merupakan pekerjaan yang berat.

"Ya meskipun hal ini pekerjaan yang cukup berat, ini

salah satu bentuk komitmen kita untuk segera menyelesaikan permasalahan tunggakan pajak ini," pungkasnya.

Sementara itu, Badan Pengelolaan Keuangan Anggaran Daerah (BPKAD) Kabupaten BU menyarankan kepada seluruh kepala OPD yang ada di lingkup Pemkab BU untuk segera mendata ulang kendaraan dinas, baik R2 dan R4 yang ada di masing-masing OPD. Bila memang memungkinkan kernas tersebut untuk segera dilakukan penghapusan aset, maka segera dilakukan proses pelelangan.

Hal ini untuk mengoptimalkan keuangan Pemkab BU.

"Kita sarankan kepada seluruh OPD untuk segera mendata ulang kernas yang ada. Bila memungkinkan kernas yang masih efektif dan efisien untuk segera dibayarkan pajaknya. Namun bila kendaraan tersebut memang tidak efisien dan efektif lagi, bila lebih mahal biaya perawatan dan operasionalnya, kita sarankan kepada pihak OPD terkait untuk melakukan penghapusan aset dan salah satu metodenya adalah segera adalah lelang," kata

Kepala BPKAD Kabupaten BU, Fitriansyah saat dikonfirmasi awak media, kemarin. (127)